

IDENTITY POLITICS AND SYMBOLIC INTERACTIONS BETWEEN SUNDANESE AND JAVANESE IN INDONESIA

POLITIK IDENTITAS DAN INTERAKSI SIMBOLIK ANTARA ETNIS SUNDA DAN ETNIS JAWA DI INDONESIA

Haryono

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

Email: haryono@untirta.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has a large area and a diverse society. Cultural diversity and social identity based on ethnicity. The analysis of this research uses a literature study approach from the results of research and journals discussing the politics of identity between Javanese and Sundanese. The results of the analysis found that, first, the politics of the Perang Bubat that occurred between Javanese and Sundanese, which has had an influence on Javanese and Sundanese society to this day. Second, the Perang Bubat can be used as a symbolic interaction between Javanese and Sundanese in giving meaning to the Perang Bubat.

Keywords: *identity politics, symbolic interaction, perang bubat*

ABSTRAK

Indonesia memiliki wilayah yang luas dan masyarakat yang beranekaragam. Keanekaragaman budaya maupun identitas sosial secara etnisitasnya. Analisis penelitian ini, menggunakan pendekatan studi pustaka dari hasil-hasil penelitian dan jurnal-jurnal yang membahas tentang politik identitas antara etnis Jawa dengan etnis Sunda. Hasil analisisnya didapatkan bahwa, pertama, perpolitikan Perang Bubat yang terjadi antara etnis Jawa dengan etnis Sunda, yang memberikan pengaruh pada masyarakat Jawa dan Sunda sampai saat ini. Kedua, Perang Bubat dapat dijadikan sebagai interaksi simbolis antara etnis Jawa dengan etnis Sunda dalam memberikan pemaknaan pada perang Bubat.

Kata Kunci: *Politik Identitas, Interaksi Simbolik, Perang Bubat*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang majemuk di mana di dalamnya terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Perbedaan tersebut telah terjalin sebagai satu kesatuan dan berdaulat dalam bangsa Indonesia. Selain itu, adanya ikatan tersebut sudah lama terjalin di antara masyarakat Indonesia yang dilatarbelakangi oleh konteks sosial budaya, geografis, dan sejarah yang sama. Ikatan tersebut diperkuat dengan didasari kesatuan pandangan, ideology, dan falsafah hidup yang melekat dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan dan ideology tersebut telah ada dan tercermin dalam bentuk sila-sila pancasila sebagai dasar negara Indonesia. lambang negara yang bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai ideology dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengandung makna sangat mendalam yang berkaitan dengan etnik di mana memiliki makna "beraneka ragam (suku bangsa, agama, bahasa), namun tetap satu yaitu Indonesia.

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitasnya (BPS, 2010). Berbagai bentuk pembangunan baik yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan di masa depan bukan berarti berbagai suku bangsa harus dihilangkan dalam program pembangunan. Akan tetapi, pembangunan harus mempertimbangkan adanya kemajemukan suku bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia terutama berbagai kebudayaan yang dimiliki oleh setiap etnik di Indonesia.

Indonesia adalah negara multi-etnis dengan lebih dari 1000 etnis dan sub-etnis. Fenomena etnis ini memainkan peran penting pada mobilitas penduduk internal. Selain itu, transmigrasi, jenis mobilitas di negeri Indonesia, diyakini sebagai proyek budaya dan ditafsirkan sebagai "Jawanisasi" proses yang dilakukan oleh pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke pulau-pulau lain di Indonesia (Tridakusumah, A.C. *et al.*, 2015). Sedangkan, tradisi Eropa secara teratur memilih untuk menggunakan etnisitas sebagai sinonim untuk kebangsaan yang didefinisikan secara historis oleh keturunan atau wilayah (Malesevic, 2004). Sementara di Amerika Serikat perbedaan ras dan etnis kronis di penjara telah menjadi fitur yang dikenal dari sistem penjara selama beberapa dekade (Nellis, 2016).

Kejadian tersebut tentunya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia misalnya perseteruan Sunda dan Jawa yang tercatat dalam perang bubat telah memengaruhi pola pikir keduanya di mana di Sunda ada 160 permainan anak-anak, 50 di antaranya berisi olok-olok terhadap anak Jawa. Permainan-permainan orang Sunda yang berisi ejekan terhadap orang Jawa tersebut menjadi simbol-simbol dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat Sunda dan secara generasi-kegenerasi disampaikan melalui permainan tersebut. Fokus penelitian ini, secara khusus membahas perpolitikan etnisitas dengan menggabungkan pendekatan interaksi simbolis dalam memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik selama perang Bubut ataupun sampai saat ini yang terjadi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Analisis tentang politik identitas dan interaksi simbolik antara etnis Sunda dengan etnis Jawa di Indonesia ini merupakan studi kepustakaan yang sumbernya didapatkan dari jurnal, buku, dan hasil penelitian-penelitian baik didapatkan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Pendekatan analisis didasarkan pada data kualitatif dan data kuantitatif yang didapatkan dari berbagai referensi atau didapatkan dalam studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dianalisis yaitu terkait dengan perpolitikan etnisitas pada masyarakat Jawa dan Sunda di Indonesia dalam kerangka analisis sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Etnik

Menurut BPS (2010) suku bangsa adalah sekelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun temurun. Sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat, identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat akan diwariskan pada generasi berikutnya. Secara kultural, identitas dan atribut suku bangsa langsung melekat pada setiap orang, sesuai dengan suku bangsa dari kedua orang tuanya.

Etnik menurut Barth (1988) dalam Frinaldi & Embi (2011) adalah suatu kelompok masyarakat yang mempunyai seperangkat kebudayaan sebagai identitas khasnya dalam bentuk berbagai simbol-simbol dan menunjukkan adanya batas-batas sosial etniknya dengan etnik lainnya dalam interaksi. Pandangan tentang etnik secara sosiologis dapat dirujuk pendapat Weber (dalam Habib, 2004; dan dalam Malesevic, 2004) dalam Frinaldi & Embi (2011) mengidentifikasi model hubungan antar-etnik pada zaman modern yaitu: *Pertama*, etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok. Weber mendefinisikan kelompok etnik sebagai kelompok yang menyuguhkan kepercayaan subjektif di dalam keturunan mereka karena adanya tipe fisik yang mirip. Hal yang krusial dari prinsip ini adalah etnisitas ada hanya ada di dasar dari kepercayaan kelompok tertentu.

Kedua, etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik sosial. Status kelompok sering berjalan pada basis terpaan sosial di mana posisi monopolistik mereka secara teratur dipakai untuk mencegah orang-orang yang bukan anggota kelompok dari memperoleh keuntungan simbolik atau material dari kelompok mereka. *Ketiga*, keragaman bentuk etnik dan organisasi sosial. Meskipun sebagian besar mereka beroperasi sebagai status kelompok, kelompok etnis dapat menggunakan bentuk kelas, kasta, dan tanah. Weber sangat tertarik dengan adanya fenomena kasta etnis, di mana status kelompok nampak bertransformasi menjadi sistem kasta. Tidak seperti status kelompok, perbedaan kasta jauh lebih kaku dan mendekati kelompok sosial.

Keempat, etnisitas dan mobilisasi politik. Weber mendefinisikan etnisitas dalam istilah dinamika aktivitas politik. Menurutnya, eksistensi dari komunitas politik merupakan prasyarat bagi perilaku kelompok etnis. Kesadaran kelompok terutama dibentuk oleh pengalaman politik secara umum, bukan dengan *common descent*.¹

Politik Etnik dan Interaksi Simbolik

Politik identitas di Indonesia telah lama menjadi topik pembicaraan menarik di kalangan para ahli ilmu sosial (Buchari, 2014). Clifford Geertz (1963) dalam Buchari (2014) dalam tulisannya tentang “primordial sentiment” menyatakan bahwa studi tentang politik identitas akan terus mendapatkan perhatian, terutama yang berkaitan dengan identitas keetnisan, gender, masyarakat pribumi (*indigenous community*), dan masyarakat lokal (*local communities*).

Penelitian tentang politik identitas etnis oleh Achyar Asmu'ie (2006), tentang Kalimantan, dalam penelitiannya, Asmu'ie mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan kabupaten ketapang luput dari pertikaian etnis, karena peran aktif para pemimpin informal, seperti tokoh-tokoh etnis, ketua adat, pemuka masyarakat, serta pemimpin agama dalam pembinaan integritas politik (Buchari, 2014).

Hasil penelitian Sjaf (2012) tentang menemukan bahwa pembentukan identitas etnik terjadi pada ruang yang disebut struktur pembentukan identitas etnik (*habitus*). Oleh karena itu, habitus dalam arena politik lokal dibedakan menjadi dua, yaitu; pertama, pembentukan identitas etnik skala besar, yaitu pembentukan identitas etnik yang mempertemukan sejarah kelompok etnik dengan pengalaman aktor. Struktur pembentukan identitas ini terjadi di inter dan antar kelompok etnik: dan kedua, pembentukan identitas etnik berdasarkan pengalaman atau disposisi-disposisi yang terjadi di dalam diri aktor. Sebelum aktor memanfaatkan sentimen (emosional) massa berbasis etnik dan jejaring yang dimilikinya, aktor terlebih dahulu mengakumulasi model ekonomi sesuai dengan kepentingannya.

Kekuatan identitas etnik di dalam politik identitas menjadi berpengaruh secara terus menerus oleh generasi selanjutnya. Serperti sejarah perang bubat antara etnik Sunda dan etnik Jawa telah menjadi simbol dan sampai sekarang terus berkembang menjadi interaksi simbolik di antara etnik Sunda dan etnik Jawa. Oleh karena itu, pandangan interaksi simbolik antara etnik Sunda dan Jawa sangat urgen untuk di telah lebih lanjut dalam perspektif politik etnik dan interaksi simbolik.

Interaksionis simbolik berusaha mengoreksi teori struktur fungsional yang mengekang individu dan perspektif ini berusaha menempatkan individu sebagai agensi, memiliki kemandirian (otonomi), dan utuh (integral) dalam menciptakan dunia sosialnya. Hewitt (2003) mengatakan bahwa orientasi umum interaksionis simbolis mengacu pada perilaku manusia dan dunia sosial manusia. Dengan mengacu pada serangkaian konsep yang lebih tepat untuk menggambarkan dan memahami fenomena di mana psikolog sosial menaruh perhatian pada unit analisisnya.. Konsep adalah cara untuk memilih untuk meneliti secara khusus aspek-aspek dunia empiris dan merupakan bangunan dasar dari sebuah teori. Teori diartikan seperangkat

¹ Kamus International.com mendefinisikan bahwa *Common Descent* merupakan nenek moyang (leluhur umum jamak) nenek moyang bahwa dua atau lebih keturunan memiliki kesamaan The raja Spanyol dan Inggris memiliki nenek moyang yang sama yaitu ratu Victoria. Teori evolusi menyatakan bahwa semua kehidupan di bumi memiliki nenek moyang yang sama. [Internet] di akses tanggal 22 Maret 2017. Tersedia dari http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=common_ancestor.

pernyataan yang mengatur hubungan antara konsep. Fungsi konsep adalah untuk menggambarkan apa yang penting tentang beberapa aspek di dunia dan teori menghubungkan konsep bersama untuk membuat pernyataan tentang dunia empiris. Maka, kemudian teori Interaksionisme Simbolik memetakan konsep analisisnya pada simbol-simbol.

Modifikasi yang diperlukan dalam pandangan Mead, mengarah pada pertimbangan struktural simbolis Interaksionisme (Stryker, 1980/2000) dalam Stryker (2008). Ini bingkai merevisi pepatah Mead. Meski masyarakat muncul dari proses sosial, terorganisir masyarakat ada sebelum kemunculan semua anggota yang baru. Dengan demikian, premis dasar dari perspektif tersebut, dapat ditulis ulang bahwa masyarakat membentuk interaksi sosial bentuk diri. Bingkai kemudian mengambil sebagai titik awal sosiologi rasa sosial di mana struktur sebagai interaksi dan hubungan bermotif, menekankan daya tahan pola seperti itu, penolakan terhadap perubahan, dan kapasitas untuk mereproduksi dirinya sendiri. Pandangan ini melihat diferensiasi sosial sebagai proses kontinyu. Homogenisasi pengalaman interaksi dan struktur dalam masyarakat (Stryker, 2008). Ini melihat masyarakat terdiri dari sistem interaksi terorganisir dan hubungan peran dan sebagai mosaik kompleks kelompok terdiferensiasi, masyarakat, dan institusi, lintas-potong oleh berbagai demarkasi berdasarkan kelas, usia, jenis kelamin, etnisitas, agama, dan sebagainya. Melihat keragaman suku kadang-kadang kadang-kadang saling bergantung satu sama lain, kadang terisolasi dan terisolasi satu sama lain dan kadang-kadang tidak, terkadang kooperatif dan kadang kala bertentangan, terkadang sangat tahan terhadap perubahan dan terkadang kurang begitu. Ini melihat kehidupan sosial yang sebagian besar terjadi tidak di dalam masyarakat secara keseluruhan namun dalam jaringan hubungan peran yang relatif kecil, banyak dan mungkin paling-lokal

Posisi Politik Etnis Sunda di Indonesia

Negara Republik Indonesia yang beragam secara etnis telah terjadi kerjasama, percampuran, maupun konflik antar etnis serta separatisme. Selin itu, terdapat pula kompetisi antar etnis dalam politik dan hasilnya terlihat antara lain dalam keterwakilan pimpinan nasional seperti jabatan presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Apabila dilihat dari konteks keterwakilan etnis, maka keterwakilan orang Sunda sebagai pemimpin nasional Indonesia masih relatif terbatas (Sujatmiko, 2014). Ada tujuh presiden Indonesia tidak ada seorang pun yang berasal dari etnis Sunda. Walaupun, menurut BPS (2011) jumlah orang Sunda merupakan kelompok kedua terbesar dengan jumlah 36.701.670 orang (15.5%) setelah orang Jawa (Tengah dan timur) sebanyak 95.217.022 orang (40.2%).

Kehidupan sosial-budaya manusia Sunda umumnya berangkat dari masa setelah masuknya Islam ke tatar Sunda. Demikian pula dinamika kehidupan politik dan pemerintahan di tatar Sunda umumnya lebih banyak terungkap dari catatan sejarah pada masa pembukaan hutan dan tatanan paksa (1750-1879-an). Penguasa di tatar Sunda tidak pernah mendirikan satu kerajaan Sunda yang menyatu. Kerajaan Sunda terakhir, pajajaran, menguasai Priangan pada abad ke-15 dan ke-17 hanya merupakan kerajaan simbolik di suatu lingkup wilayah yang luas (Mariana & Paskarina).

Kasus Sunda bukan eksklusi yang bersifat lemah (*weak exlusion*) di mana suatu kelompok tidak mampu untuk masuk dan menjadi bagian dari suatu masyarakat (Sujatmiko, 2014). Kasus etnis Sunda merupakan masalah eksklusi spasial atau regional antara jaringan politik nasional, yakni daerah Jakarta yang multi etnis, dan jaringan regional, yakni daerah Sunda. Orang Sunda yang lebih senang berada di jaringan Sunda membuat interaksi antara jaringan Sunda dan jaringan nasional menjadi terbatas (Denis & Kalekin-Fishman, 2009 dalam Sujatmiko, 2014). Dinamika masyarakat Sunda menunjukkan bagaimana mereka pada masa lalu telah mampu menjadi negara (tradisional) namun pada masa selanjutnya menjadi bagian dari negara lain. Hal tersebut erat kaitannya dengan sejarah perjalanan orang Sunda yang mendapatkan pengaruh dari luar dan kekalahan-kelahan yang dialaminya seperti mendapatkan kekalahan oleh Banten dan Cirebon ditambah gagalnya Sumedranlarang sebagai bentuk kerajaan Sunda selanjutnya.

Konflik terdapat pendapat bahwa terlalu lamanya masa penjajahan oleh Mataram dan bangsa asing mengakibatkan timbulnya inferior kompleks orang Sunda dalam berpolitik (Sujatmiko, 2014). Hal tersebut dibuktikan bahwa kerajaan Mataram memiliki keinginan keras

untuk mempertahankan perdagangan bebas di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Jawa (Wertheim, 1999). Sejarah kekuasaan mataram dan masuknya Belanda terhadap Sunda telah memberikan stimulus untuk perubahan budaya karena pengaruh dari luar.

Faktor budaya dapat mendukung atau menghambat kelompok etnis untuk berhubungan atau masuk ke jaringan sosial tertentu. Budaya yang terbuka dan multikultural akan mempermudah kegiatan manusia dengan kelompok lain atau multi jaringan (Sujatmiko, 2014). Demikian juga paradigma moderat yang kompromisitis dan mendahulukan kepentingan orang lain telah memperlemah orang Sunda. Demikian juga keadaan sebaliknya terjadi pada budaya monokultural yang lebih bersifat menutup diri. Faktor budaya negatif yang kurang mendukung daya saing orang sunda. Selama ini terdapat pandangan adanya budaya Sunda, seperti pemikiran santai atau rendah hati berlebihan, menghasilkan sikap rendah dari dalam persaingan dengan etnis lain (Sujatmiko, 2014).

Pengembangan masyarakat dan budaya Sunda mempunyai harapan dan potensi selama masih adanya kelompok inovatif dan masyarakat yang mendukungnya. Sebenarnya, pola pikir dan pola tindak seperti *Silih Asuh, Silih Asih, dan Silih Asah* (Saling menyayangi, saling mikanyaah, dan saling mendidik) dapat meningkatkan kohesi sosial yang membantu persaingan Sujatmiko (20014). Menurut Sujatmiko (20014) mengatakan ada faktor budaya multi kultural yang terbuka memberikan kesempatan bagi orang Sunda untuk mengekspresikan identitas positif budayanya sehingga menambah percaya diri orang Sunda untuk masuk ke jaringan nasional.

Politik Etnik Jawa di Indonesia

Salah satu suku bangsa yang sangat berpengaruh dalam perkembangan budaya negara Indonesia adalah etnik Jawa. Pengaruh dari budaya etnik Jawa dapat dijumpai dalam berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, kesenian hingga sampai politik nasional. Perkembangan sosial maupun politik di Indonesia dipengaruhi oleh budaya Jawa, selain dikarenakan jumlah etnik Jawa terbanyak dan dapat ditemukan disemua pelosok negeri Indonesia. konsep Jawa sentris dalam ranah politik bangsa Indonesia.

Pemimpin negara Indonesia atau presiden yang sekarang diamanahkan rakyat kepada Presiden Joko Widodo melalui pemilihan umum lima tahun sekali. Selain itu, perlu diingat bahwa dari berdirinya negara Indonesia sampai sekarang belum ada presiden Republik Indonesia yang berasal dari luar etnik Jawa. Kejadian ini telah dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai budaya dan pemimpin dari Jawa telah menjadi simbol yang kuat dalam masyarakat Indonesia.

Setidaknya ada empat faktor yang menjadikan Presiden Indonesia yang berasal dari etnik Jawa dan akhirnya menjadi budaya politik Indonesia dan secara generasi-kegenerasi tertanam menjadi simbol-simbol politik yang kuat di negara Indonesia (Utomo, 2013). *Pertama*, akibat kekuatan politik terdahulu. Politik di Indonesia ada sebuah kekuatan yang masih berlangsung hingga saat ini yaitu membeda-bedakan suku atau asal dari calon-calon presiden yang akan dipilih menjadi presiden. Para petinggi partai terdahulu yang merupakan orang Jawa juga menjadi petinggi partai sekarang juga merupakan etnik Jawa. Ini merupakan faktor yang besar mengapa bursa pencalonan presiden di Indonesia mayoritas dipenuhi oleh masyarakat Jawa.

Kedua, karakter orang Jawa yang pekerja keras, karakter etnik Jawa yang pekerja keras dapat dikaitkan pada masa kolonialisme Belanda yang menjajah Indonesia. kolonialisme Belanda yang berpusat di Jawa membuat etnik Jawa yang mendiami sebagian besar wilayah pulau Jawa gencar melakukan aksi-aksi penolakan secara terus-menerus sehingga Belanda dapat diusir dari tanah Jawa. Ketiga, Orang Jawa ingin Presiden dari etnik Jawa, walaupun masyarakat Jawa sekarang menganggap pemimpin tidak harus dari orang Jawa. Akan tetapi, masih banyak kasus di Indonesia bahwa etnik Jawa masih tetap menginginkan pemimpin dari etnik Jawa. Keempat, populasi penduduk Jawa merupakan mayoritas. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain jenisnya yang beragam, jumlah atau ukuran populasi dari setiap jenis suku bangsa juga sangat bervariasi. Suku Jawa yang terbesar pada hampir setiap wilayah teritorial Indonesia, populasinya mencapai sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,0 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Perang Bubat sebagai Interaksi Simbolik Politik Identitas Etnik Sunda dan Etnik Jawa

Perang Bubat adalah peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada tahun 1357 Masehi dan melibatkan pihak Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Disebut peristiwa sejarah karena Perang Bubat tercatat dalam beberapa sumber tradisional historiografi nusantara, seperti dalam kitab *Paraton*, *Kidung Sunda*, *Kidung Sundayana*, dan *Cerita Parahiyangan*. Dalam kitab-kitab tersebut peristiwa Perang Bubat diungkapkan dengan penekanan yang berbeda-beda (Hidayat, 2015). Hal ini dapat terjadi akibat latar belakang budaya yang berbeda dari para penulisnya. Misalnya, *Paraton* dibuat oleh orang Jawa sehingga keberpihakan terhadap tokoh-tokoh Majapahit lebih kentara. Hal yang sama terjadi dalam *Cerita Parahiyangan* yang memberi penekanan lebih besar kepada tokoh-tokoh Sunda. Namun demikian, secara garis besar alur kisah dari seluruh kitab yang memuat peristiwa Perang Bubat memiliki kesamaan.

Perang Bubat terjadi dalam perencanaan pernikahan Hayam Wuruk (Raja Majapahit) dengan Putri Raja Sunda yaitu Dyah Pitaloka. Setelah beberapa hari perjalanan menuju Majapahit, rombongan kerajaan Sunda telah sampai ke Bubat dan menunggu jemputan dari kerajaan Majapahit ke Bubat. Akan tetapi, jemputan ditanggapi berbeda oleh Patih Mada (Gajah Mada). Patih Mada beranggapan bahwa putri Sunda itu sebagai upeti dari kerajaan Sunda untuk kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, pihak Majapahit tidak perlu menjemput sang putri yang berada di Bubat.

Betapa berangnya Prabu Linggabuwana ketika mendengar cerita utusan itu. Ia tidak mau Kerajaan Sunda dianggap sebagai taklukan Kerajaan Majapahit. Ia merasa harga dirinya di injak-injak oleh pihak Majapahit. Akhirnya, mereka berjanji akan menjunjung tinggi harga diri orang Sunda, kendati harus ditebus dengan nyawa dan pertumpahan darah (Hidayat, 2015). Dengan demikian, pertempuran tidak dapat dicegah. Kerajaan Sunda yang tidak memiliki persenjataan lengkap karena hanya membawa pengawal kerajaan akhirnya terdesak dan gugur. Pasukan kerajaan Sunda tidak tersisa, semua tewas di medan perang termasuk Prabu Linggabuwana. Selain itu, Dyah Pitaloka pun mengorbankan dirinya demi kehormatan bangsa dan negara.

Peristiwa Perang Bubat telah menjadi simbol yang kuat dalam diri masyarakat Sunda dan Masyarakat Jawa sampai sekarang, di mana banyak larangan-larangan dari sebagian masyarakat Sunda untuk menikah dengan orang Jawa. Begitupun sebaliknya, karena ditakutkan akan membawa dampak yang negatif. Perpolitikan Jawa sampai saat ini masih kuat dikancah nasional, tetapi etnik Sunda masih belum mampu mencapai ke tahap puncak pimpinan atau Presiden di Indonesia. akan tetapi, peristiwa sejarah tersebut, menjadi perhatian penting dan sebagai simbol pertempuran antara etnik Sunda dan Jawa.

KESIMPULAN

Politik identitas di Indonesia masih terjadi sampai saat ini, tentunya sudah terbukti, di mana etnis Jawa menjadi aktor utama dalam perpolitikan tingkat nasional, akan tetapi, ada politik identitas yang terjadi di masa lalu yang berdampak sampai saat ini, di mana terjadinya perang bubat dalam sejarah orang Sunda telah memberikan simbol atau pemaknaan yang mendalam, karena mereka yang gugur ketika mempertahankan kehormatan negaranya. Walaupun, ada sebagian pendapat yang menyatakan Perang Bubat sebagai hasil dari cerita-cerita yang dibuat oleh Belanda. Akan tetapi, Perang Bubat telah menjadi simbol yang kuat antara orang Sunda dan orang Jawa. Dengan demikian, sejarah perang Bubat telah menjadi tatanan sosial atau struktur sosial baik bagi orang Sunda maupun orang Jawa dalam melakukan beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hubungan kedua etnik tersebut. Misalnya, masih ada beberapa masyarakat yang melarang menikahkan anak perempuan Sunda kepada laki-laki etnik Jawa. Hal tersebut, terjadi karena faktor sejarah dan definisi situasi yang berbeda dari masyarakat. faktanya, hari ini banyak perempuan Sunda yang menikah dengan Laki-laki Jawa.

Nuansa perang Bubat, membuat perpolitikan etnik Jawa semakin menguasai perpolitikan nasional. Karena tujuan dari Majapahit yaitu Patih Gajah Mada agar dapat menguasai wilayah Sunda yang masih belum dapat ditaklukan. Sejarah perang Bubat dan adanya penjajahan yang

dilakukan kerajaan Mataram kepada etnik Sunda telah membuat etnik sunda memiliki Budaya tertutup. Walaupun, saat ini orang sunda telah mengalami perubahan ke budaya terbuka. Akan tetapi, jaringan sosial orang Sunda di kancah nasional masih memiliki jaringan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2010). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Buchari, S. A. (2014). Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Frinaldi A, dan Embi M. A. (2011). Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keadilan dan Keterbukaan PNS dalam Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi. *Jurnal Humanus*. Vol. X No.1 Th. 2011
- Malesevic, S. (2004). *The Sociology of Ethnicity*. London: SAGE Publication Ltd.
- Nellis, A. (2016). *The Color of Justice: Racial and Ethnic Disparity in State Prisons*. Washington: The Sentencing Project, Research and Advocacy Reform.
- Sijatmiko, I. G. (2014). Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia. *Jurnal sosiologi*, Vol. 19, No. 1.
- Sjaf, S. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tridakusumah, A. C. *et. al.* (2015). *Social Identity, Ethnicity and Internal Mobility in Indonesia*. Paper.
- Wertheim, W. F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi (Studi Perubahan Sosial)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mariana D, Paskarina C. Kebangkitan Lokal Menjawab Tantangan Globalisasi: Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Sunda. Bandung (ID) Universitas Padjajaran [Internet]. Di akses pada tanggal 22 Maret 2017. Dapat di akses dari http://repository.unpad.ac.id/2898/1/revitalisasi_nilai-nilai_budaya_sunda.pdf.
- Hewitt, J. P. (2003) . *Sel and Society: A Symbolic Interactionst Social Psychology*. Allyn and Bacon, Boston.
- Utomo W. W. *Budaya Politik Dalam Etnis Jawa (Tesis)*. Medan (ID): Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Stryker, S. (2008). From Mead to a Structural Symbolic Interactionism and Beyond. *The Annual Review of Sociology*. 34: 15-31.
- Hidayat, S. (2015). *Pandangan Dunia Orang Sunda Dalam Tiga Novel Indonesia Tentang Perang Bubat*. Bnadung (ID): *Jurnal Nerasastra*, Vol. 8 No 1.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]